

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, struktur pemerintahan tidak jauh berbeda dengan tatanan pemerintahan Hindia Belanda. Sistem pemerintahannya masih menggunakan istilah Keresidenan dan Kewedanaan (dalam bahasa Belanda disebut *Onder Afdeeling*). Namun pasca terbentuknya Republik Indonesia ini maka pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan hasil sidang PPKI memutuskan Indonesia menjadi 8 Provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur di antaranya Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan (Borneo), Sulawesi dan Maluku.¹

Pemerintahan Provinsi Sumatera merupakan salah satu daerah tingkat Provinsi yang membawahi seluruh Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya dengan kedudukan ibukotanya berada di Medan. Provinsi Sumatera pada saat itu membawahi sepuluh keresidenan yakni Aceh, Tapanuli, Sumatera Timur, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Sumatera adalah Provinsi dengan membawahi Keresidenan terbanyak pada saat itu sehingga sangat sulit dikontrol masing-masing wilayahnya. Seluruh tokoh Sumatera berkumpul di Bukittinggi (Keresidenan Sumatera Barat) yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera yaitu Tengku Moh Hasan dan perwakilan sepuluh Residen atau dikenal dengan rapat

¹ Lagut. 2020."Sejarah Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara 1864- 2013". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Sejarah Jurusan Sejarah dan Arkeologi. Universitas Jambi. Hlm 4

KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) membicarakan perihal pembagian wilayah Sumatera.²

Berdasarkan keputusan yang diambil oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 15 April 1946, pulau Sumatera kemudian dipecah menjadi tiga Provinsi. Provinsi-Provinsi tersebut adalah Provinsi Sumatera Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan mencakup Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Sementara Provinsi Sumatera Tengah terdiri dari Keresidenan Jambi, Sumatera Barat, dan Riau. Provinsi Sumatera Utara terbagi dari Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.³

*Keresidenan*⁴ Jambi merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Pada tahun 1948 keresidenan Jambi berhasil membentuk 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja. Adapun kabupaten yang berhasil dibentuk yakni pertama Kabupaten Merangin atau diistilahkan oleh masyarakat Jambi dengan Kabupaten Jambi Hulu yang beribukota di Bangko. Kabupaten ini membawahi 4 pemerintahan Kewedanaan seperti Kewedanaan Sarolangun,

² Leo Amanda J. 2022. "Pemerintahan Kabupaten Jambi Hulu 1946-1965". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Sejarah Jurusan Sejarah, seni dan Arkeologi. Hlm 2

³ Lindayanti, dkk. Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pesako Batuah. Kota Jambi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dokumentasi Daerah. Hlm 34

⁴ Residentes menempati posisi di bawah gubernur, sesuai dengan struktur pemerintahan Hindia Belanda. Residente sebagai jabatan struktural (kepala pemerintahan wilayah) yang bertanggung jawab atas pemerintahan wilayah dan masa penjajahan Belanda di Indonesia. Keresidenan Palembang adalah wilayah administratif yang dikelola oleh seorang Residen, yang mencakup beberapa wilayah bagiannya yang terdiri dari Afdeeling dan Onder Afdeeling hingga Kampung/Marga. Atau bisa juga didefinisikan bahwa Keresidenan (*regentschappen*) adalah pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950-an (Kemas A. R. Panji & Sri. Sejarah Keresidenan Palembang Fakultas Adab dan Budaya Islam IAIN Raden Fatah dan FKIP Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang.)

Kewedanaan Bangko, Kewedanaan Bungo dan Kewedanaan Tebo. Jelang beberapa tahun ibukota Kabupaten Merangin akhirnya dipindahkan ke Muaro Bungo pada tahun 1958.⁵

Kedua Kabupaten Batang Hari, juga dikenal sebagai Kabupaten Jambi Hilir oleh masyarakat, memiliki ibu kota di Kenali Asam. Kabupaten ini terbagi menjadi tiga kewedanaan, termasuk kewedanaan Muara Tembesi, Kewedanaan Jambi Luar Kota, dan Kewedanaan Kuala Tungkal. Pada tahun 1979, ibu kota Kabupaten Batang Hari dipindahkan ke Muara Bulian.⁶ Kabupaten Batang Hari dulunya dikenal sebagai Kabupaten dengan wilayah yang sangat luas. Sebagai Kabupaten terdekat dengan Kota Jambi, Batang Hari memiliki peran penting sebagai penyangga perekonomian kota tersebut. Harapannya, letak strategis ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama setelah wilayahnya berkurang karena pemekaran Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari diharapkan lebih focus pada perencanaan dan kebijakan pembangunan, baik secara fisik maupun pengembangan sumber daya manusia.⁷

*Kewedanaan*⁸ Kuala Tungkal merupakan pemerintahan daerah di bawah Kabupaten Batang Hari. Kewedanaan Kuala Tungkal berdiri pasca Indonesia

⁵ Ria Riski. 2022.” Kedudukan Muara Bulian Sebagai Ibukota batang Hari 1979-1999”. *Skripsi Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Jambi*. Hlm 12

⁶ Ria Riski, *ibid*, hlm 13

⁷ Rias Riski, *Ibid*, hlm 1

⁸ Kewedanaan adalah wilayah dibawah Kabupaten, namun pada saat ini Ex wilayahnya sama dengan Kabupaten yang berdiri pada saat ini. Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum (Undang-undang No. 6 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 15) dan seiring dengan perkembangan ketatanegaraan, dipandang perlu untuk menghilangkan system Keresidenan dan Kewedanaan. Sejak Peraturan Presiden ini diumumkan, semua wilayah pemerintah yang setara dengan dengan Keresidenan dan Kewedanaan, dengan segala nama yang diberikan, dihapuskan di seluruh

merdeka yakni tahun 1945. Pemerintahan Kewedanaan Kuala Tungkal terdiri dari 3 kecamatan yakni: Tungkal Ilir, Tungkal Ulu dan Muara Sabak. Muara Sabak merupakan pemerintahan tingkat Kecamatan di Kewedanaan Kuala Tungkal. Muara Sabak merupakan daerah pesisir Jambi yang selalu mengalami pergantian birokrasi pemerintahan. Muara Sabak merupakan daerah yang menganut sistem pemerintahan marga di Keresidenan Jambi. Adapun Muara Sabak hanya terdiri dari 2 pemerintahan marga yakni Marga Dendang dan Marga Sabak.⁹

Pada masa kewedanaan Kuala Tungkal Muara Sabak disebut sebagai Asisten Wedana di bawah kewedanaan kuala tungkal atau masyarakat Muara Sabak menyebutnya dengan wakilnya Kuala Tngkal pada saat itu. Seiring dengan itu penghapusan istilah keresidenan dan kewedanaan pada saat itu juga telah digaungkan. Pada tahun 1965, terjadi perubahan struktur administrative di Muara Sabak karena wilayah Kabupaten Batang Hari di pecah menjadi dua daerah tingkat II. Kabupaten Dati II Batang Hari dan Kabupaten Dati II Tanjung Jabung masing-masing memiliki ibu kota masing-masing di Kenali Asam dan Kuala Tungkal. melalui Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965. Tungkal Ulu, Tungkal Ilir, Muara Sabak, dan Nipah Panjang adalah wilayahnya.¹⁰

wilayah Indonesia.(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 Tentang Penghapusan Keresidenan Dan Kewedanaan

⁹ M Elza. 2021.” Perkembangan Pasar Pelabuhan Dagang 1965-1983”. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Jambi. Hlm 23

¹⁰ Anonim. 2018. Profil Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Muara Sabak: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sejarah dan Nilai Tradisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hlm 3

Seiring dengan ini juga pemerintahan Kewedanaan dibubarkan dan Muara Sabak di bawah langsung oleh Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung. Pasca pemberontakan PKI di akhir 1965 tetap menjalankan sistem pemerintahan marga sehingga struktur pemerintahan Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Sebagai berikut:Kecamatan Muara Sabak, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Kuala Tungkal.¹¹Namun status Muara Sabak tetap Kecamatan yang membawahi dua marga yakni Marga Dendang dan Marga Sabak.

Setelah penghapusan sistem pemerintahan marga tahun 1979, Muara Sabak berubah status menjadi sebuah Kecamatan ibukota Kecamatan. sebelum disahkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, kecamatan Muara Sabak, yang sebelumnya merupakan pusat pemerintahan marga Dendang Sabak yang dipimpin oleh seorang Pasirah atau Kepala Marga. Muara Sabak menjadi pusat perdagangan di Muara Sungai Batanghari, menyediakan makanan untuk daerah sekitarnya.¹²

Pasca jatuhnya pemerintahan orde baru dan dimulainya era reformasi, pemerintah melakukan pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung menjadi dua daerah, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada 4 Oktober 1999, Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 membentuk Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas sekitar 5.445 kilometer persegi, yang merupakan sekitar 10,2 persen dari total Provinsi

¹¹ M Elza, *opcit.* Hlm 26

¹² Sika Nurhasanah. 2022. "Kehidupan ekonomi dan social budaya masyarakat Muara Sabak tahun 1999-2010". *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi Hlm 36

Jambi. Dengan pemekaran ini, wilayah Muara Sabak berubah status menjadi Kabupaten sendiri, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muara Sabak.¹³

Penulisan sejarah Muara Sabak ini kurang mendapatkan perhatian yang serius dari para akademisi sejarah atau ilmu humaniora terkait. Jika dikaji dalam sistem sejarah politik pasca kemerdekaan Muara Sabak merupakan kajian yang unik untuk diteliti. Sejak Indonesia merdeka dari zaman ke residenan sampai penghapusan keresidenan sangat minim pengetahuan masyarakat dan generasi muda tentang sejarah politik Muara Sabak. Banyak para generasi muda bertanya-tanya masa itu bagian wilayah yang mana Muara Sabak. Dengan demikian penulis tertarik untuk menelusuri lebih lanjut Sejarah Muara Sabak ini dengan demikian penulis memberikan judul dengan: Perubahan Birokrasi Pemerintahan Di Muara Sabak 1948-1999.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dapat diambil sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan birokrasi pemerintahan Muara Sabak dibawah kewedanaan Kuala Tungkal ke Kabupaten Tanjung Jabung 1948- 1965?
2. Bagaimana perkembangan pemerintahan Muara Sabak tahun 1965 -1999?

1.3.Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian ini pada inti permasalahan, penelitian akan dibatasi dengan batasan spasial dan temporal. Wilayah penelitian akan terbatas pada

¹³ *Ibid*, Hlm 37

Muara Sabak, yang pada masa lalu merupakan bagian dari Kabupaten Batang Hari. Batasan temporal penelitian ini akan dimulai dari tahun 1948-1999. Penetapan tahun 1948 dipilih karena pada saat itu terjadi pembentukan Kabupaten Batang Hari dan Muara Sabak menjadi bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari di bawah Kewedanaan Kuala Tungkal. Batas waktu penelitian ditetapkan hingga tahun 1999 karena pada tahun tersebut resmi terbentuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung (sekarang Tanjung Jabung Barat), dan Muara Sabak ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perubahan birokrasi pemerintahan Muara Sabak di bawah kewedanaan Kuala Tungkal ke Kabupaten Tanjung Jabung tahun 1948-1965.
2. Mengetahui perkembangan pemerintahan Muara Sabak tahun 1965-1999.

Selain itu, diharapkan bahwa penelitian dan tulisan ini akan memberi sumbangan kepada penelitian Sejarah dan Budaya yang akan datang, menjadi acuan untuk penelitian yang sama. meningkatkan diskusi dan pengetahuan tentang sejarah yang berkaitan dengan penulisan sejarah politik, terutama di Provinsi Jambi.

1. Salah satu manfaat dari penulisan ini adalah bahwa karya tersebut akan menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang karena akan membantu masyarakat mengenal lebih dekat Muara Sabak dan sistem politiknya

2. Dalam bidang praktisi penulisan sejarah politik ini dapat dijadikan referensi dan inventaris sejarah politik provinsi Jambi.
3. Dalam bidang akademisi dapat menjadi referensi mahasiswa, akademisi sejarah, budayawan, pamong budaya, analis sejarah dalam penulisan sejarah politik kedepannya.

1.5.Tinjauan Pustaka

Kajian sejarah seputar Muara Sabak memang dikatakan merupakan penelitian yang sangat langka ibaratkan hutan belum banyak dijajajah oleh manusia. Namun penulis berhasil mengumpulkan dan mendokumentasikan beberapa penelitian terkait yang masih berhubungan dengan penelitian ini baik dalam konteks lokalitas maupun dalam tematik Sejarah.

Tinjauan pustaka pertama adalah penelitian Yulia Resha Pertiwi dengan judul penelitian “ Sejarah Pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1999-2010.” Penelitian ini merupakan penelitian yang sangat kontemporer membahas sejarah terbentuknya Kabupaten Tanjung Timur yang memekarkan diri dari Kabupaten Tanjung Jabung. penelitian ini di luar dari temporal penelitian penulis, namun penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yakni sama membahas spasialnya. Walaupun demikian terdapat perbedaan yang mencolok yakni seputar temporal dalam penelitian ini penulis mengambil tahun penelitian pada tahun 1999-2010 sedangkan penelitian saya yaitu dari tahun 1948-1999 , tidak hanya temporal dalam lingkup spasial dan kajian juga berbeda yang mana penulis ini membahas awal terbentuknya dan pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan

perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan penelitian saya membahas tentang pemerintahan Kecamatan Muara Sabak pada masa Kabupaten Batang hari dibawah Kewedanaan Kuala Tungkal sampai Muara Sabak menjadi Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur.¹⁴

Adapun tulisan terkait selanjutnya adalah buku inventarisasi sumber sejarah yang diterbitkan oleh Dinas Kearsipan Kabupaten Tanjung Barat yang berjudul *Perlawanan Rakyat Kuala Tungkal 1949*.¹⁵ Dalam buku ini membahas dan melihat perlawanan rakyat Kuala Tungkal pada masa revolusi kemerdekaan. Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan Muara Sabak. Walau bagaimana pun juga wilayah Muara Sabak merupakan bagian dari Kewedanaan Kuala Tungkal pada masa itu. Namun ada perbedaan yang mencolok yakni penelitian ini lebih menekankan sejarah revolusi, sedangkan penelitian penulis lebih melihat sejarah perpolitikannya.

Tulisan selanjutnya adalah Skripsi Charles S Sitanggang. Dengan judul “Perkembangan Kewedanaan Jambi Luar Kota 1948-1965”¹⁶ penelitian ini membahas wilayah kewedanaan Jambi Luar kota yang merupakan bagian dari kabupaten batang Hari meliputi sejarah politik, sosial dan budaya. Penelitian ini walaupun berbeda spasial namun sangat memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena temporal yang dikaji sama. Sama dalam arti kata yakni sama-sama

¹⁴ Pertiwi, Yulia Resha. 2017.” Sejarah Pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 1999-2010.”*Skripsi*. Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Jambi.

¹⁵ Tim Penulis Dinas Kearsipan Tanjung Jabung Barat. 2019. *Perlawanan Rakyat Kuala Tungkal 1949. Kuala Tungkal*. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

¹⁶ Charles S Sitanggang. 2023.”Perkembangan Kewedanaan Jambi Luar Kota 1948-1965”. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Jambi.

membahas sejarah salah satu bagian dari Kabupaten Batang Hari. Perbedaan terletak pada spasial kajian penelitian penulis.

Tulisan selanjutnya adalah skripsi Erik Arfansyah. Dengan judul skripsi “Perubahan sistem pemerintahan di daerah Maro Sebo: dari sistem Marga ke sistem pemerintahan Desa Muara Jambi 1933 - 1979.”¹⁷ Penelitian ini bertujuan menyelidiki sebuah arsip yang mencatat pengangkatan pasirah pertama pada tahun 1933 oleh Residen Jambi, serat mengulas perubahan system pemerintahan yang terjadi di Maro Sebo. Fokusnya adalah mengkaji dampak penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 terhadap peran pesirah marga Maro Sebo di Desa Muaro Jambi, yang sebelumnya menjadi pusat pemerintahan Marga Sebo.

Tulisan selanjutnya adalah skripsi Mairi Rahmadani. Dengan judul “Birokrasi Pemerintahan di Kewedanaan Muaro Bungo Tahun 1945-1965”.¹⁸ Penelitian ini mengkaji perkembangan Kewedanaan Muaro Bungo setelah Kemerdekaan, meliputi perubahan struktur pemerintahan dari era Kesultanan hingga Republik, serta pemekaran Kabupaten Merangin menjadi dua Kabupaten, yaitu Bungo Tebo dan Kabupaten Bangko. Fokus penelitian ini terletak pada analisis temporal mengenai evolusi birokrasi pemerintahan di wilayah tersebut. Penelitian ini sejalan dengan kerangka waktu yang sama namun membedakan diri melalui pendekatan spasial yang diambil oleh peneliti.

¹⁷ Arfansyah, Erik. 2021. “Perubahan Sistem Pemerintahan Di Daerah Maro Sebo: Dari Sistem Marga Ke Sistem Pemerintahan Desa Muara Jambi 1933-1979.” *Skripsi*. Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Jambi.

¹⁸ Rahmadani, M. 2022. Birokrasi Pemerintahan Kewedanaan Muaro Bungo Tahun 1945-1965. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Jambi.

Tulisan selanjutnya adalah jurnal Erdianto, dengan judul “ Perkembangan Kelembagaan Dari Negeri dan Marga Menjadi Desa di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat “. ¹⁹ Penelitian ini mengulas sejarah pembentukan Tungkal Ulu, peristiwa revolusi fisik di wilayah tersebut, hingga proses pemekaran Kecamatan Tungkal Ulu dan perkembangan desa dari awalnya bernama Negeri atau Marga. Fokus penelitian juga mencakup pembahasan tentang struktur daerah otonom terkecil dalam konteks ketatanegaraan Indonesia serta pertumbuhan dan perkembangan desa di Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Tulisan ini sejalan dengan minat penulis dalam mengeksplorasi sebuah daerah, dari periode Kewedanaan Kuala Tungkal hingga pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung.

Dalam kontek bahasan sejarah politik tinjauan pustaka yang paling relevan adalah Jurnal Supian dan Lagut yang berjudul “Perubahan Birokrasi Pemerintahan Kewedanaan Rawas”. ²⁰ Dalam jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan IPS IAIN Palu ini membahas proses perubahan birokrasi pemerintahan di Kewedanaan Rawas dari masa Jepang sampai Kemerdekaan. Tulisan ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama membahas sebuah perubahan politik di daerah. Namun memiliki perbedaan pada spasial dan temporal penelitian.

¹⁹ Erdianto. (2010). Perkembangan kelembagaan Dari Negeri dan marga menjadi desa di kecamatan tungkal Ulu Kabupaten tanjab Barat Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30652/jih.v1i02.1153>

²⁰ Supian dan Lagut. 2020.” Perubahan Birokrasi Pemerintahan Kewedanaan Rawas”. *Jurnal Moderasi*. Program Studi Tadris IPS IAIN Palu. Vol 2

1.6.Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan penelitian dengan kajian spesifik sejarah politik lokal. Berkembangnya pemikiran bahwa sejarah sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa politik disekitarnya baik itu perang, diplomasi serta tindakan-tindakan tokoh yang terlibat sangat mempengaruhi penulisan sejarah politik. Tulisan-tulisan yang berkembang tidak terlepas dari peranan tokoh besar dan pahlawan yang sangat mendominasi. Hal ini tentu menimbulkan kejenuhan bagi para sejarawan yang membuat mereka mulai menggunakan gaya penulisan sejarah politik baru dengan merubah pisau analisis dari deskriptif-naratif menjadi kritis ilmiah dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk kerangka analisis yang lebih mendalam.²¹

Menulis sebuah sejarah politik di kehidupan masyarakat bisa dilihat dengan korelasi antara distribusi kekuasaan, struktur sosial, sistem jaringan hubungan sosial dalam masyarakat serta distribusi komoditi antara sumber daya dan manusia. Hal tersebut akan terlihat dengan mudah jika penggunaan metodologi ilmu sosial lain, yaitu dengan pendekatan sistem politik. Walaupun demikian, sebagai sebuah kajian sejarah, prosedur penulisan tidak boleh meninggalkan ciri khas sejarah yaitu persepektif historis (pendekatan diakronik).

Perkembangan dalam penulisan sejarah yang mengadopsi pendekatan ilmu-ilmu sosial telah mendorong munculnya gaya baru dalam penulisan sejarah politik. Pendekatan ini tidak hanya meluaskan pandangan politik, tetapi juga menghasilkan

²¹ Undri,dkk. 2021. Menyusun Materi Tentang Sumber Sejarah. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. Hlm 35

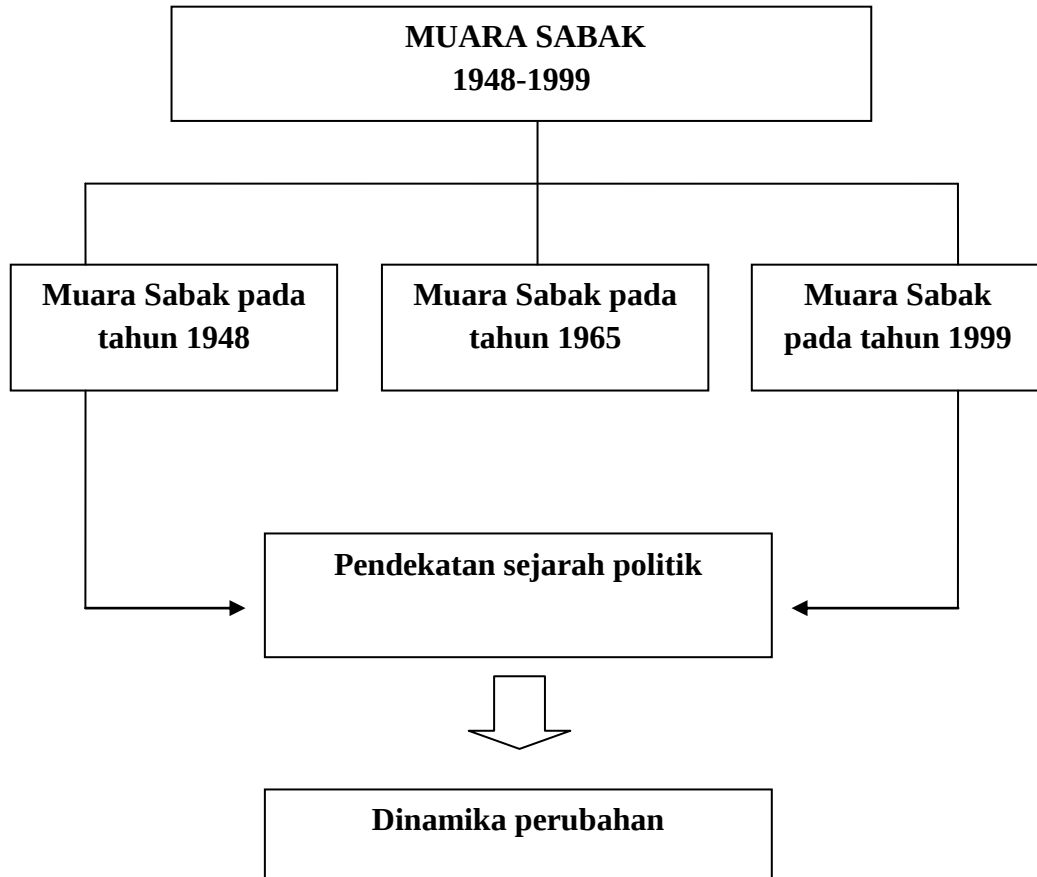
perspektif politik yang lebih menyeluruh dan berdimensi banyak. Perspektif ini mencakup hubungan antara proses politik dengan jaringan sosial, sistem ekonomi, nilai-nilai dan aspek lainnya.²²

Untuk melakukan penelitian ini penulis meminjam salah satu teori ilmu sosial yakni teori politik. Teori politik melibatkan studi tentang ide-ide dasar mengenai bagaimana tujuan politik ditetapkan, cara untuk mencapainya, dan dampak yang ditimbulkannya. Konsep ilmu politik digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan sosial politik yang terjadi dalam penjelasan ini. Konsep politik adalah sebuah abstraksi yang memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan mereka untuk memikirkan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara, terutama terkait dengan posisi dan kekuasaannya. Terdapat dua asumsi mendasar yang menunjukkan pentingnya distribusi dan alokasi dalam ilmu politik. Pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab ekonomi untuk mendistribusikan bahan bakar, hasil pertanian, dan alokasi dana pembangunan. Dalam ranah politik, terjadi distribusi kekuasaan antara rakyat dan pejabat publik. Dalam birokrasi dan administrasi, terdapat kewajiban untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan didistribusikan di antara lembaga-lembaga politik dalam struktur pemerintahan. Kedua, ini dari berbagai kepentingan. Oleh karena itu, distribusi kekuasaan dan alokasi menjadi sangat penting, tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapi dalam konteks kekuasaan politik itu sendiri.²³

²² *Ibid*, hlm 36

²³ Sakti, Fajar Tri. Pengantar Ilmu Politik. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020

Bagan 1.1
Kerangka Berfikir



1.7. Metode Penelitian

Sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu yang terhubung dengan prosedur ilmiah.²⁴ Metode penelitian diperlukan untuk menciptakan sejarah ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa masa lalu. Ada empat tahapan dalam melakukan penelitian dan penulisan sejarah itu adalah: (1) Fase heuristik, yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber, informasi, dan jejak masa lalu. (2) Tahap kritik, yaitu identifikasi, pemeriksaan kelayakan, pemilihan sumber informasi; (3) Tahap interpretasi berupa analisis dan sintesis (menyatukan fakta sejarah). (4) Tahap historiografi, tahap akhir penelitian sejarah untuk penulisan.²⁵

1. Heuristik

Heuristik mengacu pada langkah-langkah mengumpulkan sumber dan mencari berbagai data relevan terkait topik penelitian. Hal ini mencakup bahan referensi seperti buku, jurnal, artikel, arsip, wawancara dan arsip-arsip foto untuk penciptaan karya sejarah. Pengumpulan data terkait permasalahan dalam artikel ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan di beberapa perpustakaan antara lain perpustakaan Universitas Jambi, Perpustakaan Eks Fakultas Ilmu Budaya (SESA) Universitas Jambi, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi. Penelusuran literatur menghasilkan sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa arsip mengenai Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah tingkat II Sarolangun-Bangko

²⁴ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta, Benteng Budaya 1995), hal 18.

²⁵ *Ibid*

dan Daerah tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah UU No 12 tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, peraturan Presiden Republik Indonesia No 22 tahun 1963 tentang penghapusan Keresidenan dan Kewedanaan, arsip badan pusat statistik tentang Muara Sabak dan dokumentasi mengenai Kecamatan Muara Sabak. Sumber sekunder berupa buku, jurnal, wawancara dan berbagai artikel akademis dari dokumen pemerintah mengenai Muara Sabak.

2. Kritik Sumber/ Verifikasi Sumber

Sumber-sumber yang dikumpulkan, baik berupa sumber fisik, tertulis, maupun lisan, diperiksa atau diuji melalui serangkaian kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai derajat validitas dan reliabilitas sumber informasi, misalnya untuk mendeteksi penipuan dalam dokumen. Di sisi lain, kritik internal diperlukan untuk menilai tingkat keandalan informasi yang diberikan sumber. Kredibilitas suatu sumber seringkali mencakup isi dan informasi yang terkandung dalam sumber tertulis, serta kemampuan sumber lisan dalam mengungkapkan kebenaran peristiwa sejarah.

3. Interpretasi

Interpretasi merujuk pada langkah menyatukan berbagai fakta yang diperoleh dari sumber sejarah yang relevan dengan teori, lalu mengorganisirnya menjadi suatu penafsiran.²⁶ Tujuannya adalah untuk menyatukan fakta-fakta yang pada awalnya

²⁶ Nur Laela. *Skripsi*. "Perjuangan Rakyat Parakan-Temanggung Dalam mempertahankan Kemerdekaan 1945-1949". Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam FAIB UIN Sunan Kalijaga. 2014. Hlm 18-19

terlihat terpisah-pisah menjadi sebuah keterkaitan yang saling mendukung. Melalui proses interpretasi, hubungan antar fakta dikembangkan untuk mencapai sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang tema yang sedang dipelajari.

4. Historiografi

Setelah melakukan proses analisis dan sintesis, proses kerja mencapai tahap terakhir, yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Penulisan ini bertujuan untuk mengintegrasikan fakta-fakta yang sebelumnya terpisah-pisah menjadi sebuah narasi kronologis yang logis dan sistematis.

1.8.Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup kajian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM MUARA SABAK pada bab ini akan membahas gambaran umum spasial penelitian seperti kondisi geografis dan topografis, keadaan demografis, keadaan alam, budaya dan ekonomi.

BAB III PERUBAHAN BIROKRASI PEMERINTAHAN MUARA SABAK DI BAWAH KEWEDANAAN KUALA TUNGKAL KE KABUPATEN TANJUNG JABUNG TAHUN 1948-1965 dalam bab ini akan membahas perubahan birokrasi pemerintahan di Muara Sabak yang terdiri dari perubahan masa Keresidenan Jambi, Perubahan Masa Kabupaten Batang Hari

BAB IV PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN MUARA SABAK TAHUN

1965-1999 pada bab ini akan membahas birokrasi pemerintahan Muara Sabak pada masa Tanjung Jabung sampai terbentuknya Tanjung Jabung Timur.

BAB V PENUTUP Simpulan dan Saran